

ABSTRAKSI

Pelaksanaan otonomi daerah lewat produk Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 telah merubah pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana lewat produk Undang-Undang tersebut pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kondisi riil wilayahnya, sehingga didaerah banyak ditemui aneka macam kebijakan yang bermunculan.

Seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi yang membuat gebrakan dengan kebijakan pembelian kapal LCT Sri Tanjung I dan II yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi ini dinilai banyak kalangan sebagai sebuah kebijakan yang fenomenal karena disatu sisi kebijakan ini dinilai sangat efektif untuk masa depan, dilain pihak kebijakan ini masih menjadi tanda tanya besar terkait manajemen birokrat dimana image lama yang tidak efektif, korup, tidak transparan, sehingga akuntabilitasnya diragukan.

Kondisi seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip **Good Government** yang menekankan pada terciptanya kondisi yang **transparan, akuntabilitas, dan keefektifan** pengelolaan betul-betul tercapai. Pada studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi dan Keefektifan Administrasi Dalam Kebijakan Pembelian Kapal LCT Sri Tanjung I dan II ini penulis ingin mengetahui apakah kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai diatas atau tidak. Dalam perkembangannya sebuah policy sekarang tidak bisa diukur dengan pencapaian hasil akhir semata.

Dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan peneliti mampu menangkap beberapa fenomena menarik seputar transparansi, akuntabilitas, dan Keefektifan dari kebijakan ini. Untuk itu pendekatan studi kasus dirasa sangat tepat untuk memperoleh data yang akurat terhadap realitas yang terjadi sehingga kita dapat mengetahui dengan seksama realitas yang terjadi dalam kebijakan pemerinth daerah kabupaten Banyuwangi, jadi tidak sebatas mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah semata.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta-fakta yang menarik. Secara pencapaian hasil kebijakan terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi, tetapi dengan catatan pada prosedur Administrasinya masih ditemukan kontroversi seputar Akuntabilitas dan Transparansinya. Hal ini terbukti ketika peneliti mengalami kesulitan mencari data autentik mengenai landasan hukum dan bagaimana proses pengadaan kapal LCT Sri Tanjung I dan II ini. Dari uraian memperlihatkan sebuah fenomena menarik untuk diteliti.